



MASALAH LINGKUNGAN

Proyek TPST Piyungan Tinggal Uji Lindi

Yusef Leon, Alif Annissa Karim, Jumali
 redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Pemda DIY telah merampungkan pengerjaan fisik Zona Transisi 2 Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan awal pekan ini. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY akan melaksanakan uji coba *commissioning* (pengujian struktur dan sistem) terhadap Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) yang digunakan di kawasan itu.

► Halaman 10

Proyek TPST..

Kepala DPUPESDM DIY, Anna Rina Herbranti, mengatakan Zona Transisi 2 TPST Piyungan selesai dikerjakan pada Senin (6/11).

Rina menambahkan instansinya pun telah melakukan serah terima sementara pekerjaan (Provisional Hand Over-Pho) dari pelaksanaan proyek pembangunan Zona Transisi 2 TPST Piyungan. "Selanjutnya kami akan uji *commissioning* untuk IPL pengolahan lindi, kemudian Zona Transisi 2 dipersonalkan oleh DLHK," kata Anna, Selasa (7/11).

Anna menerangkan sebelum pengerjaan Zona Transisi 2 TPST Piyungan rampung, DLHK DIY sudah membuang sampah di lokasi itu. Sebab, Zona Transisi 1 tidak lagi sanggup menampung beban sampah dari wilayah setempat. "Zona Transisi 1 diisi di bagian tampungannya," katanya.

Kapasitas sampah di Zona Transisi 2 mencapai sekitar 149.000 meter kubik.

Dalam waktu dekat, DPUPESDM DIY akan melakukan uji *commissioning* terhadap IPL di Zona Transisi 2 TPST Piyungan. "IPL lama sudah penuh sehingga kami buat yang baru untuk menampung lindi dari Zona Transisi 1 dan 2. IPL yang lama untuk menampung lindi dari Zona A dan B yang lama. Air lindi diolah sehingga sudah tidak mencemari ketika dibuang ke sungai," kata Anna. Senin kemarin, Gubernur DIY Sri Sultan HB X bertemu dengan perwakilan Kementerian Keuangan (Kemkeu) guna membahas tindak lanjut soal rencana desain penataan TPST Piyungan.

Meski metode pengelolaan sampah di DIY akan memakai skema desentralisasi, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengelola TPST Piyungan masih memungkinkan dijalankan. Namun kesepakatan

dengan investor gagal terlaksana. "Kami akan coba memindahkan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan-bantuan sosial dalam pengelolaan sampah di tingkat kabupaten kota," kata Sri Sultan.

Sultan berharap kabupaten dan kota tetap bisa menjalankan desentralisasi pengelolaan sampah dan mengalihkan pinjaman atau bantuan-bantuan sosial untuk mengelola sampah tersebut. "Saya perlu ketemu wali kota dan bupati dulu, mereka mau tidak. Sebelum ketemu tentu saya tidak berani bicara, karena mereka juga pasti menginginkan investasi untuk mengolah sampah, kami hanya mengoordinasi," kata Sultan.

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu RI, Brahmanto Isdiyoso, mengatakan timnya akan bertemu langsung dengan tim Pemda DIY. Pertemuan itu membahas perumusan desain yang lebih cocok untuk pembangunan TPST Piyungan. "Desain ini nantinya juga akan dirumuskan dalam konteks *recovery* ekonomi, khususnya ekonomi daerah setelah pandemi. Jadi semuanya mengarah pada kebijakan yang inklusif, artinya bersama-sama berfokus pada pemulihan ekonomi yang lebih cepat," katanya.

Gandeng Swasta

Sementara itu, Pemkot Jogja menggandeng PT Biru Sistem Perkasa untuk mengolah sampah akibat keterbatasan lahan. Sejauh ini, keduanya telah menandatangani MOU dan melakukan peninjauan kerja sama lebih jauh.

PT Biru Sistem Perkasa masih memperstapakan lahan untuk alat insinerator sekaligus lokasi

pengolahan sampah.

Kabid Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Ahmad Haryoko belum bisa memastikan lokasi yang akan digunakan untuk mengolah sampah. Haryoko memastikan lokasinya akan berada di luar Kota Jogja. "Titik lokasi masih dalam pembahasan," ujar Haryoko.

Meski lokasinya belum pasti, Haryoko mengatakan setidaknya ada batas minimal luasan lahan. Ini mengingat sampah yang harus diolah PT Biru Sistem Perkasa terbilang banyak, yakni mencapai 60 ton perhari. "Minimal 1,5 hektare," imbuhnya.

Penjabat Wali Kota Jogja Singgih Raharjo menuturkan skema kerja sama yang diterapkan adalah *business to business* (b2b) antara BUMD Logjatama Vishesha dengan PT Biru Sistem Perkasa. "Ite akan dilitung oleh b2b. Saya belum mendapatkan informasi lebih detail tentang itu karena itu akan masuk dalam perjanjian kerja sama mereka," ujar Singgih.

Adapun, Pemkab Sleman terus mengebut pembangunan TPST Tamanmartani. Hingga awal November 2023, proses pembangunan TPST yang akan mengadalkan teknologi pengelolaan sampah dengan *refuse derived fuel* (RDF) itu telah mencapai 70%.

"Saat ini tinggal *finishing*, dan memasukkan alat. Selain itu, juga masih ada pengerjaan instalasi listriknya juga," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman, Epiphana Kristiyani.

Oleh karena itu, Epi optimistis TPST yang dibangun di atas TKD seluas 1,3 hektare itu akan selesai tepat waktu, yakni akhir November 2023. Nantinya, pada awal Desember, Pemkab Sleman akan melakukan uji coba sehingga harapannya awal Januari 2024 sudah bisa beroperasi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005